

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KONAWE SELATAN



2019



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN KONAWE SELATAN



2019

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

KABUPATEN KONAWE SELATAN

2019

<https://konawekab.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KONAWA SELATAN 2019

No. Publikasi : 74050.1958
Katalog BPS : 4102004.7405
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 76 halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Kabupaten Konawe Selatan

Gambar Kulit :
Pramadya Yuyu Ananda, SST
BPS Kabupaten Konawe Selatan

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan

Dicetak Oleh :
CV. Metro Graphia Kendari

Sumber Ilustrasi :
Pexels.com
Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Konawe Selatan 2019

merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Selatan yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan penduduk Kabupaten Konawe Selatan antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari BPS maupun Dinas atau Badan terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan dan untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, serta Kemiskinan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Andoolo, Desember 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Konawe Selatan



Muh. Amin, SE.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xii
1. KEPENDUDUKAN	1
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	4
1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	5
1.3 Angka Beban Ketergantungan.....	8
1.4 Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama	10
1.5 Penggunaan Alat/Cara KB	13
2. KESEHATAN DAN GIZI.....	15
2.1 Derajat dan Status Kesehatan penduduk.....	18
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	19
3. PENDIDIKAN	23
3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.....	26
3.2 Tingkat Pendidikan	29
3.3 Tingkat Partisipasi Sekolah.....	31
3.4 Kualitas Pelayanan Sekolah.....	34
4. KETENAGAKERJAAN	37
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka	40
4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	41
4.3 Lapangan Usaha	42
4.4 Status Pekerjaan.....	44

5. TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	47
5.1 Pengeluaran Rumah Tangga	49
5.2 Konsumsi Energi dan Protein	52
6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN.....	55
6.1 Kualitas Sumber Air.....	57
6.2 Fasilitas Rumah Tinggal.....	59
7. KEMISKINAN	63
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin	65
7.2 Garis Kemiskinan.....	66
LAMPIRAN.....	69

<https://konselkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Halaman

KEPENDUDUKAN

Tabel 1.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2014-2018.....	5
Tabel 1.2	Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan, 2018	6
Tabel 1.3	Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2014-2018.....	10
Tabel 1.4	Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2017-2018	12
Tabel 1.5	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2017-2018	14

KESEHATAN DAN GIZI

Tabel 2.1	Perkembangan Angka Harapan Hidup, 2010-2018	18
Tabel 2.2	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin, 2018.....	19
Tabel 2.3	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Menurut Karakteristik, 2018.....	20
Tabel 2.4	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan, 2018.....	21
Tabel 2.5	Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk, 2016-2018	22

PENDIDIKAN

Tabel 3.1	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Konawe Selatan, 2016-2018.....	29
Tabel 3.2	Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan, 2018	30
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, 2017-2018.....	33
Tabel 3.4	Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Sekolah, 2014/2015-2017/2018.....	36

KETENAGAKERJAAN

Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2016 dan 2018	40
Tabel 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2018.....	42
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan, 2018	44
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status, 2018.....	45

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Tabel 5.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2017-2018.....	50
Tabel 5.2	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan Menurut Kuintil Pengeluaran, 2017-2018.....	51
Tabel 5.3	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Penduduk menurut Kuintil Pengeluaran, 2018.....	53

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Mata Air Untuk Keperluan Sehari-hari, 2017-2018.....	59
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2017-2018	61
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2017-2018	62

KEMISKINAN

Tabel 7.1	Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Konawe Selatan, 2012-2017.....	66
Tabel 7.2	Garis Kemiskinan, 2015-2017	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Konawe Selatan, 2016-2018.....	4
Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan Konawe Selatan, 2016-2018	9
Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Konawe Selatan, 2016-2018.....	18
Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah Konawe Selatan, 2016-2018	27
Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah Konawe Selatan, 2016-2018	28
Gambar 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Konawe Selatan, 2016-2018	41
Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Per Kapita/Bulan, 2016-2018.....	49
Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Mata Air Untuk Keperluan Sehari-hari, 2016-2018	58
Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas, 2016-2018	61
Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin, 2016-2018	67

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
MA	Madrasah Aliyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SM	Sekolah Menengah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	Total Fertility Rate (Angka Fertilitas Total)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

1. KEPENDUDUKAN



1

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan angka kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta distribusi penduduk yang tidak merata dapat menjadi masalah di waktu mendatang.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Komposisi penduduk dengan penduduk usia produktif yang lebih rendah akan menciptakan angka beban ketergantungan yang tinggi. Kondisi tersebut nantinya akan kembali membawa Indonesia kepada masalah baru yang lainnya. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

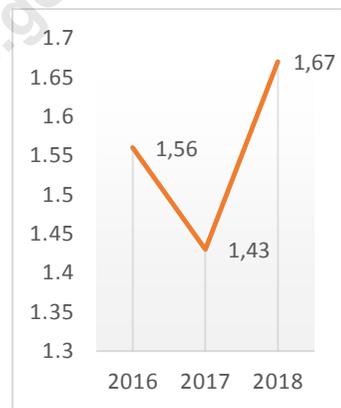
1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Indonesia, lebih khusus di Kabupaten Konawe Selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan tercatat sekitar 309.298 jiwa atau sekitar 11,66 persen dari total penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 2.653.654 jiwa pada tahun 2018. Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan mengalami kenaikan sekitar 5.084 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017 yang mencapai 304.214 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan saat ini mengalami peningkatan sekitar 6,69 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu empat tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan telah mengalami penambahan penduduk sebesar 19.383 jiwa.

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2018 tercatat sebesar 1,67 persen atau mengalami percepatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Konawe Selatan sebesar 1,59 dan pada tahun 2016 tercatat sebesar 1,90 persen. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk telah menunjukkan adanya keberhasilan.

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan menjadi wilayah dengan persentase jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Kendari. Pada tahun yang sama jumlah penduduk Kota Kendari mencakup sekitar 14,38 persen penduduk seluruh Sulawesi Tenggara. Dengan besarnya proporsi Konawe Selatan bagi Sulawesi Tenggara tersebut, tentunya kebijakan kependudukan yang dibuat pun akan memberikan dampak yang signifikan bagi Sulawesi Tenggara.

Gambar 1.1 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Konawe Selatan, 2016-2018



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Konawe Selatan 2010-2035

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	289.915	3,29	104
2015	295.326	1,90	104
2016	299.928	1,56	104
2017	304.214	1,43	104
2018	309.298	1,67	104

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Selama tahun 2014-2018, *sex ratio* Kabupaten Konawe Selatan cenderung konstan pada angka 104. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 104 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki 4 persen lebih banyak dibanding perempuan. Hal ini dapat disebabkan diantaranya karena adanya migrasi penduduk ke Kabupaten Konawe Selatan yang lebih didominasi oleh penduduk laki-laki dengan tujuan utama migrasinya untuk mencari pekerjaan imbas dari berdirinya beberapa perusahaan swasta nasional pada sektor pertanian maupun sektor pertambangan.

1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Konawe Selatan yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk juga terjadi di Kabupaten Konawe Selatan. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

KEPENDUDUKAN

Selama ini persebaran penduduk di Kabupaten Konawe Selatan tidak merata antar kecamatan. Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035, pada tahun 2018 penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Tinanggea sebanyak 24.923 jiwa atau 8,05 persen dari total penduduk Kabupaten Konawe Selatan. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya berada di Kecamatan Laeya (7,18 persen dari total penduduk Kabupaten Konawe Selatan), dan Kecamatan Konda (6,85 persen dari total penduduk Kabupaten Konawe Selatan).

Pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Konawe Selatan sebesar 11,69 persen dari total penduduk Sulawesi Tenggara. Jumlah penduduk terbesar mendiami Kecamatan Tinanggea, Laeya, dan Konda.

Tabel 1.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Persentase Penduduk	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Tinanggea	70	8,06	24.923
Lalembuu	89	5,90	18.240
Andoolo	100	3,36	10.383
Buke	83	5,00	15.471
Andoolo Barat	115	2,81	8.690
Palangga	81	4,64	14.364
Palangga Selatan	65	2,32	7.176
Baito	58	2,86	8.840
Lainea	49	3,35	10.370
Laeya	80	7,18	22.220
Kolono	31	3,51	10.850
Kolono Timur	41	1,63	5.051
Laonti	27	3,57	11.040

Lanjutan Tabel 1.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Persentase Penduduk	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Moramo	64	4,90	15.168
Moramo Utara	44	2,71	8.387
Konda	160	6,85	21.196
Wolasi	35	1,79	5.530
Ranomeeto	196	6,13	18.965
Ranomeeto Barat	100	2,46	7.620
Landonon	63	2,56	7.903
Mowila	103	4,23	13.074
Sabulakoa	80	1,78	5.505
Angata	53	5,63	17.424
Benua	82	3,68	11.376
Basala	90	3,08	9.532
Kabupaten Konawe Selatan	69	100,00	309.298

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Jika dilihat dari kepadatan penduduk di setiap kecamatan, Kecamatan Ranomeeto menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Pada tahun 2018, di Kecamatan Ranomeeto tercatat sebanyak 196 jiwa per km². Sementara itu, Kecamatan Laonti merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, yakni hanya ditempati oleh 27 jiwa per km².

Kepadatan penduduk di seluruh kecamatan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Kepadatan penduduk pada wilayah yang berbatasan

langsung dengan Kota Kendari jauh lebih tinggi dibanding dengan wilayah lainnya. Hal ini seperti yang terjadi pada Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Konda karena memiliki akses yang cukup mudah menuju ibukota provinsi dan sejumlah area publik seperti bandara, terminal, dan rumah sakit sehingga banyak berdiri daerah pemukiman baru (perumahan, asrama, dan lain sebagainya).

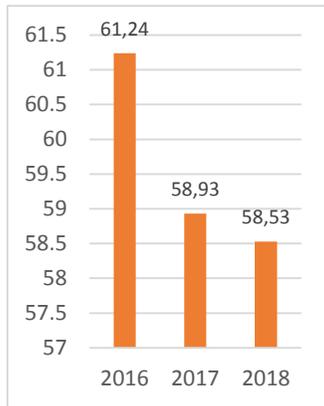
Kepadatan penduduk pada wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Kendari jauh lebih tinggi dibanding dengan wilayah lainnya

1.3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Selama periode 2014-2018 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014 angka beban tanggungan Kabupaten Konawe Selatan sebesar 62,55 persen, hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 62-63 penduduk usia tidak produktif. Sampai pada tahun 2018, angka beban tanggungan penduduk produktif berada pada posisi 58,53 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 58-59 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan Konawe Selatan, 2016-2018



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Konawe Selatan 2010-2035

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka kategori usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai konsumsi makanan dan non makanan penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) maupun yang tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas). Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 ada sebanyak 34,82 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 34,09 persen pada tahun 2015. Kemudian angka tersebut sempat naik kembali pada tahun 20116 menjadi 34,20 persen, sebelum akhirnya turun kembali di tahun 2017 menjadi 33,02 persen. Hingga pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 0-14 tahun berhasil turun kembali menjadi 32,76 persen.

KEPENDUDUKAN

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2014-2018

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	34,82	61,52	3,66	62,55
2015	34,09	62,59	3,32	59,77
2016	34,20	62,02	3,78	61,24
2017	33,02	62,92	4,06	58,93
2018	32,76	63,08	4,16	58,53

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Pada Tabel 1.3. juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Konawe Selatan masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 mencapai 61,52 persen pada tahun 2014 dan kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar 62,59 persen dan terus meningkat lagi menjadi 63,08 persen hingga tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Konawe Selatan menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 3,66 persen pada tahun 2014 menjadi 3,78 persen pada tahun 2016 dan 4,16 persen pada tahun 2018.

1.4. Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya.

Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017, komposisi penduduk menurut status perkawinan menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok laki-laki usia 10 tahun ke atas lebih besar dibanding perempuan pada kelompok usia yang sama, yakni 35,83 persen berbanding 26,13 persen. Sementara itu penduduk yang berstatus kawin pada kelompok perempuan sebesar 63,37 persen, sedikit lebih besar dibandingkan laki-laki yang hanya 60,32 persen. Begitu pula penduduk yang berstatus cerai, kelompok perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, baik yang cerai hidup maupun cerai mati. Sebesar 10,50 persen perempuan kelompok usia diatas 10 tahun berstatus janda (status perkawinannya cerai mati atau cerai hidup). Sedangkan laki-laki yang berstatus duda (status perkawinannya cerai mati atau cerai hidup) sejumlah 3,85 persen pada kelompok usia yang sama.

Persentase penduduk pernah menikah mengalami peningkatan selama periode 2016 hingga 2017 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2018. Pada tahun 2016

KEPENDUDUKAN

persentase penduduk pernah menikah sebesar 66,52 persen dan meningkat menjadi 68,94 persen pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 persentase penduduk yang pernah menikah turun sedikit menjadi 68,38 persen.

Sedangkan persentase penduduk yang pernah bercerai (cerai hidup dan cerai mati) mengalami kecenderungan penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016 persentase jumlah penduduk yang pernah bercerai sebanyak 7 persen dan meningkat menjadi 7,12 persen pada tahun 2017, sebelum akhirnya menurun cukup banyak di tahun 2018 menjadi 6,14 persen. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan selama kurun tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,86 persen. Berdasarkan tabel 1.4 juga terlihat bahwa persentase penduduk yang berstatus kawin dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas dengan status kawin tercatat sebanyak 59,52 persen. Angka tersebut meningkat di tahun 2017 menjadi 61,82 persen dan kemudian terus meningkat di tahun 2018 menjadi 62,24 persen.

Tabel 1.4 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan, 2016-2018

[Diolah dari Hasil Susenas]

Status Perkawinan	Tahun		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	33,48	31,06	31,62
Kawin	59,52	61,82	62,24
Cerai	7,00	7,12	6,14

1.5. Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, alat/cara KB dibedakan menjadi MKJP atau Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (meliputi: tubektomi/MOW, vasektomi/MOP, IUD dan susuk KB/implant), Non MKJP (meliputi: suntikan KB, pil KB, kondom/karet KB, intravag/kondom wanita/diafragma) dan cara tradisional. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunaanya.

Berdasarkan Hasil Susenas 2018, selama kurun waktu 2016-2018 persentase wanita berusia 15-49 tahun dan berstatus kawin yang pernah menggunakan KB memiliki tren yang terus meningkat. Pada tahun 2016, persentase wanita yang pernah menggunakan KB tercatat hanya sebesar 10,45 persen. Angka

KEPENDUDUKAN

tersebut kemudian meningkat drastis pada tahun berikutnya menjadi 17,05 persen. Dan pada tahun 2018, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang berstatus kawin yang pernah menggunakan KB tercatat sebesar 21,29 persen.

Namun angka tersebut justru berbanding terbalik dengan persentase wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin yang aktif menggunakan KB yang justru mengalami tren penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Persentase wanita berusia 15-49 tahun berstatus kawin yang aktif menggunakan KB pada tahun 2016 tercatat cukup besar yaitu sebanyak 68,04 persen. Akan tetapi, angka tersebut justru turun pada tahun berikutnya menjadi 57,75 persen dan turun kembali pada tahun 2018 menjadi hanya 57,31 persen.

Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2016-2018

[Diolah dari Hasil Susenas]

Status Penggunaan Alat/Cara KB	Tahun		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Pernah Menggunakan	10,45	17,05	21,29
Sedang Menggunakan	68,04	57,75	57,31
Tidak Pernah Menggunakan	21,51	25,21	21,40

2. KESEHATAN DAN GIZI



2

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

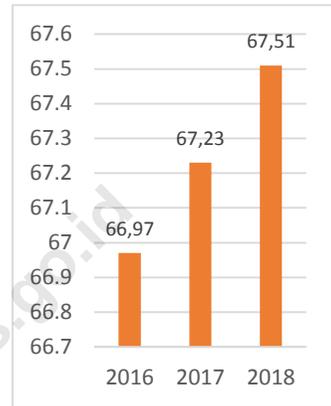
Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka KesakitanPenduduk, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya angka usia harapan hidup penduduknya. Sumber data perkembangan angka harapan hidup, pada tabel 2.1 dibawah ini merujuk pada publikasi Indeks Pembangunan Manusia. Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Konawe Selatan, telah diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup (e0). Di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2018 tercatat harapan usia hidup berada pada kisaran umur 67,51 tahun, lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 67,23 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Konawe Selatan, 2016-2018



Sumber IPM BPS

Tabel 2.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup(e0), 2010-2018

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)
(1)	(2)
2010	63,20
2011	63,65
2012	64,05
2013	65,02
2014	65,60
2015	66,32
2016	66,97
2017	67,23
2018	67,51

Sumber : IPM BPS

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2018 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Konawe Selatan mencapai 16,43 persen. Angka Kesakitan penduduk berjenis kelamin laki-laki tahun 2018 lebih rendah dari penduduk berjenis kelamin perempuan, yakni masing-masing sekitar 16,42 persen untuk laki-laki dan 16,44 persen untuk perempuan. Lebih rendahnya angka kesakitan penduduk laki-laki dibandingkan dengan angka kesakitan penduduk perempuan tidak terlepas dari anatomi fisik laki-laki yang memang lebih kuat dibandingkan perempuan.

Tabel 2.2 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin, 2018

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten Konawe Selatan	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Kesakitan	16,42	16,44	16,43

2.3. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya

adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa/kelurahan.

Tabel 2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Menurut Karakteristik, 2018

[Diolah dari Hasil Susenas]

Karakteristik	2018
(1)	(5)
Melahirkan di fasilitas kesehatan	62,96
Melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan	82,71

Pada tahun 2018, sebanyak 62,96 persen wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin melahirkan di fasilitas kesehatan. Sementara itu, persentase perempuan usia 15-49 tahun pernah kawin di Konawe Selatan yang melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan pada tahun 2018 sebesar 82,71 persen.

Besarnya persentase perempuan yang melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan dibandingkan dengan yang melahirkan di fasilitas kesehatan ini menunjukkan bahwa kendatipun tidak melangsungkan proses persalinan di fasilitas kesehatan, beberapa dari mereka tetap memilih untuk menjalani proses persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan, sekalipun itu di rumah. Hal tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terutama ibu hamil akan keselamatan selama proses persalinan..

Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan, 2018

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Kelamin	Pengguna Jaminan Kesehatan
(1)	(2)
Laki-Laki	53,45
Perempuan	59,02
Laki-Laki + Perempuan	56,60

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. BPJS Kesehatan adalah badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan JKN. Pemanfaatan jaminan kesehatan tersebut menjadi indikator penting bagi pemerintah nasional maupun daerah untuk melihat sejauh mana kebijakan bantuan kesehatan yang disediakan bagi pemerintah mampu dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan Tabel 2.7, terlihat bahwa pada tahun 2018, persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan secara umum sebesar 56,60 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, persentase penggunaan jaminan kesehatan bagi penduduk perempuan di Konawe Selatan sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk laki-lakinya. Hal ini juga tidak terlepas dari angka kesakitan penduduk perempuan yang sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Persentase penduduk perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan adalah sebesar 59,02 persen. Sementara persentase penduduk laki-laki yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan adalah sebesar 53,45 persen.

Tabel 2.5 Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk, 2016-2018

Puskesmas dan Rasionya	2016	2017	2018
(1)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Puskesmas	23	23	24
Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk	2,30	2,26	2,32

Sumber: Catatan Administrasi Dinkes Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan Tabel 2.8 menunjukkan bahwa terjadi penambahan ketersediaan sarana puskesmas sebanyak 1 unit pada tahun 2018. Dengan demikian, jumlah puskesmas yang terdapat di Konawe Selatan pada tahun 2018 adalah sebanyak 24 unit yang tersebar di berbagai kecamatan di Konawe Selatan. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk cenderung fluktuatif, yakni dari 2,30 per 30.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 2,26 per 30.000 penduduk pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018, rasio puskesmas kembali meningkat menjadi 2,32 per 30.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus terus melakukan upaya memenuhi kebutuhan pelayanan medis masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang terdidik dan terlatih.

3. PENDIDIKAN



3

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003, Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, dan Rasio Murid Guru.

3.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah
Konawe Selatan, 2016-2018



Sumber IPM BPS

Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan Ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2018 Kabupaten Konawe Selatan, tujuan pembangunan pendidikan diantaranya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya akses anak usia sekolah terhadap layanan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan berbagai kebijakan tersebut diharapkan angka putus sekolah menurun. Dengan turunnya angka putus sekolah, secara tidak langsung berdampak pada semakin tingginya harapan lama sekolah bagi penduduk keterkaitan antara harapan lama sekolah, angka putus sekolah dan kondisi pendidikan saat ini.

Gambarannya adalah sebagai berikut, jika kebijakan bidang pendidikan kondusif dan mendorong penduduk untuk tetap bersekolah, maka angka putus sekolah akan turun. Jika angka putus sekolah turun, berarti harapan lama sekolah naik. Walaupun mungkin kenaikan itu tidak langsung terlihat pada waktu yang bersamaan. Artinya, dampak terhadap harapan lama sekolah akan terlihat beberapa tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang tidak terjadi secara instan dan tiba-tiba.

Pada tahun 2018, terjadi kenaikan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Konawe Selatan bila dibandingkan dengan tahun 2016. HLS naik dari 12,16 pada tahun 2016 menjadi 12,23 tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga

lulus SMA. Kenaikan HLS ini menunjukkan perbaikan kondisi pendidikan di wilayah ini.

Ukuran lain mengenai pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

RLS di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2016 tercatat masih berada di angka 7,71 tahun. Kemudian, angka tersebut meningkat di tahun berikutnya menjadi 7,72 tahun. Hingga pada tahun 2018, angka rata-rata lama sekolah Konawe Selatan tercatat sebesar 7,73 tahun. Ini berarti hingga tahun 2018, secara rata-rata penduduk Kabupaten Konawe Selatan usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas 2). Meski naik, dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Konawe Selatan yang berusia 25 tahun ke atas putus sekolah saat berada di kelas 2 SMP.

Sesungguhnya, angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah beberapa tahun yang lalu, karena ini merupakan *outcome* dari proses pendidikan. Karena RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun keatas, artinya penduduk yang saat ini diperkirakan telah menyelesaikan proses pendidikannya. Sedangkan kondisi pendidikan saat ini akan berpengaruh pada angka HLS saat ini dan secara tidak langsung berpengaruh pada angka RLS beberapa tahun kedepan.

Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah Konawe Selatan, 2016-2018



Sumber IPM BPS

Tabel 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Konawe Selatan, 2016-2018

Indikator	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,16	12,22	12,23
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,71	7,72	7,73

3.2. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Semakin tingginya status pendidikan yang dimiliki oleh seseorang diharapkan akan semakin meningkatkan keahlian dan keterampilannya. Dan dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator status pendidikan yang dimiliki juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Pada tahun 2018, penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah bersekolah sama sekali sebanyak 6,57 persen, di mana mayoritas dari penduduk tersebut berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat lebih dalam lagi, sekitar 5,28 persen penduduk laki-laki berusia 5 tahun ke atas memiliki status pendidikan tidak atau belum pernah bersekolah. Sementara dari sisi penduduk perempuan, tercatat sekitar 7,93 persen penduduk perempuan yang berusia 5 tahun ke atas tercatat tidak atau belum pernah bersekolah.

Pada tahun 2018, penduduk laki-laki usia 5 tahun ke atas

PENDIDIKAN

yang masih bersekolah di jenjang SD atau sederajat sebesar 16,95 persen, sedangkan untuk penduduk perempuannya sebesar 16,05 persen. Secara total, penduduk Konawe Selatan usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah di jenjang SD atau sederajat sebesar 16,51 persen, yang paling besar di antara jenjang lainnya.

Pada jenjang SMP atau sederajat, penduduk laki-laki di Konawe Selatan usia 5 tahun ke atas yang tercatat masih bersekolah di jenjang SMP atau sederajat pada tahun 2018 sebanyak 6,21 persen, sementara untuk penduduk perempuannya pada jenjang yang sama tercatat sebesar 5,18 persen. Secara umum, penduduk usia 5 tahun ke atas di Konawe Selatan pada tahun 2018 yang masih bersekolah di jenjang SMP atau sederajatnya sebesar 5,71 persen.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan, 2018

[Diolah dari Hasil Susenas]

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(3)	(5)	(7)
Tidak/belum Pernah Bersekolah	5,28	7,93	6,57
Masih Sekolah di SD/Sederajat	16,95	16,05	16,51
Masih Sekolah di SMP/Sederajat	6,21	5,18	5,71
Masih Sekolah di SMA ke Atas	5,05	7,65	6,32
Tidak bersekolah lagi	66,51	63,19	64,89

Pada jenjang SMA ke atas, penduduk laki-laki di Konawe Selatan usia 5 tahun ke atas yang tercatat masih bersekolah di jenjang SMA ke atas pada tahun 2018 sebanyak 5,05 persen, sementara untuk penduduk perempuannya pada jenjang yang sama tercatat sebesar 7,65 persen. Secara umum, penduduk usia

5 tahun ke atas di Konawe Selatan pada tahun 2018 yang masih bersekolah di jenjang SMA ke atas sebesar 6,32 persen.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum pada tahun 2018 penduduk dengan jenis kelamin laki-laki mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki Hal ini tercermin dari persentase penduduk yang masih bersekolah di tiap-tiap jenjangnya di mana penduduk laki-laki selalu memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Selain itu, pada persentase penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah juga menunjukkan persentase penduduk perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk perempuan masih memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki

3.3. Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. APS untuk menilai pencapaian MDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

PENDIDIKAN

Pada tahun 2018, Angka Partisipasi Sekolah untuk penduduk usia 7-12 tahun mencapai 99,75 persen atau dengan kata lain semua anak usia 7-12 tahun hampir semua sudah bersekolah. Angka tersebut menunjukkan sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2017 hanya terdapat sekitar 0,18 persen anak usia 7-12 tahun yang belum bersekolah.

Untuk penduduk dengan kelompok usia 13-15 tahun, masih banyak anak yang tidak bersekolah. Pada tahun 2018 terdapat sebesar 3,67 persen penduduk usia 13-15 tahun yang tidak mengenyam pendidikan. Sedangkan tahun 2017, terdapat sebesar 4,81 persen anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah. Peningkatan APS penduduk usia 13-15 tahun tersebut menunjukkan terjadinya penurunan jumlah anak putus sekolah pada kelompok umur 13-15 tahun.

Tahun 2018, APS penduduk usia 13-15 dan usia 16-18 tahun lebih besar dibanding APS tahun sebelumnya, menunjukkan terjadinya penurunan jumlah anak putus sekolah pada kelompok umur tersebut.

Penduduk dengan kelompok usia 16-18 tahun, Angka Partisipasi Sekolah semakin kecil atau dengan kata lain persentase penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah semakin besar. Pada tahun 2017 hanya terdapat sebesar 67,96 persen penduduk usia 16-18 tahun yang sedang mengenyam pendidikan. Sedangkan tahun 2017, terdapat sebesar 63,59 persen penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah.. Peningkatan APS penduduk usia 16-18 tahun tersebut menunjukkan berkurangnya jumlah penduduk putus sekolah pada kelompok umur 16-18 tahun.

Pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa APS penduduk laki-laki maupun perempuan pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok, sedangkan pada kelompok umur 16-18 tahun APS laki-laki lebih tinggi dibandingkan APS perempuan. Secara umum, partisipasi sekolah tahun 2018 menunjukkan peningkatan pada beberapa kelompok usia dibandingkan tahun sebelumnya kecuali kelompok usia 7-12 tahun yang mengalami sedikit penurunan sebesar 0,07 persen.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, 2017-2018

[Diolah dari Hasil Susenas]

Indikator Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
APS						
-7-12 tahun	100,00	100,00	99,64	99,47	99,82	99,75
-13-15 tahun	94,34	96,63	96,05	96,07	95,19	96,33
-16-18 tahun	71,80	60,25	53,19	75,88	63,59	67,96
APM						
- SD/MI	100,00	97,01	92,69	99,47	96,32	98,17
- SMP/MTs	75,63	89,54	70,54	63,09	73,11	75,60
- SMA/SMK/MA	67,40	53,71	53,19	62,98	61,13	58,28

Peningkatan APM terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan untuk anak-anak mereka pada jenjang SD/MI dan juga SMP/MTS. Secara umum APM SD pada tahun 2018 tercatat sebesar 98,17 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat hanya sebesar 96,32 persen. APM SMP yang juga mengalami peningkatan berhasil bertambah 2,49 poin dari 73,11 persen pada tahun 2017 menjadi 75,60 persen pada tahun 2018. Satu-satunya jenjang pendidikan yang mengalami penurunan adalah tingkat SMA yang menurun dari 61,13 persen di tahun 2017 menjadi 58,28 persen di tahun 2018.

Pada tingkat pendidikan SD dan SMP, APM laki-laki lebih besar bila dibandingkan dengan APM perempuan.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM pada tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA untuk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. APM SD untuk laki-laki tercatat sebesar 100 persen pada tahun 2018, sedangkan APM SD untuk perempuan sebesar 97,01 persen. Pada tingkat pendidikan SMP, APM laki-laki sebesar 89,54 persen, dibanding APM perempuan sebesar 63,09 persen pada tahun 2018. Pada jenjang pendidikan

SMA, APM laki-laki tercatat sebesar 53,71 persen berbanding 62,98 persen APM perempuan.

3.4. Kualitas Pelayanan Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid-guru dan rasio murid-kelas.

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogi, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar dan variasi di dalam kelas.

Selama kurun waktu tahun ajaran 2014/2015 hingga 2017/2018 rasio murid-guru menunjukkan angka yang cenderung naik turun, dimana pada tahun pelajaran 2014/2015 Rasio Murid-Guru SD tercatat sebesar 16 turun menjadi 15 pada tahun pelajaran 2017/2018. Pada jenjang pendidikan SMP Rasio Murid-Guru sebesar 14 pada tahun pelajaran 2017/2018 naik signifikan bila dibandingkan tahun pelajaran 2014/2015 yang tercatat

sebesar 7. Sementara pada jenjang pendidikan SMA, Rasio Murid-Guru tercatat 12 pada tahun pelajaran 2014/2015, naik menjadi 13 pada tahun pelajaran 2017/2018.

Indikator berikutnya adalah rasio murid per sekolah. Rasio murid per sekolah adalah perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah di setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per sekolah digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan murid suatu sekolah di daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan murid semakin tinggi atau dapat dikatakan bahwa jumlah siswa yang ada di dalam sekolah tersebut tinggi. Tingginya rasio murid per sekolah juga akan memberikan dampak pada rendahnya efektivitas proses belajar mengajar.

Selama kurun waktu tahun ajaran 2014/2015 hingga 2017/2018 rasio murid-sekolah tercatat cukup berfluktuatif. Pada periode pendidikan 2014/2015, rasio murid-sekolah pada jenjang pendidikan SD sebesar 138, menurun pada periode 2015/2016 sebesar 123, kemudian terus menurun sampai pada periode 2017/2018 tercatat sebesar 118. Angka tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi penurunan beban murid setiap sekolah pada jenjang pendidikan SD. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP, rasio murid-sekolah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah murid pada setiap sekolah. Pada tahun pelajaran 2014/2015 rata-rata setiap sekolah mendidik 76 murid, kemudian meningkat pada tahun pelajaran 2017/2018 menjadi 168, artinya setiap sekolah mempunyai beban sebanyak 168 murid untuk dididik.

Peningkatan rasio murid-sekolah terjadi pada jenjang pendidikan SMA dalam kurun waktu ajaran 2014/2015 hingga 2016/2017. Pada tahun pelajaran 2014/2015 terdapat sebanyak 264 murid setiap sekolah menjadi sebanyak 306 murid pada tahun pelajaran 2015/2016. Kemudian angka tersebut meningkat kembali menjadi 315 pada tahun 2016/2017 sebelum akhirnya menurun cukup drastis pada tahun 2017/2018 menjadi 236. Hal

PENDIDIKAN

ini menunjukkan bahwa efektivitas proses belajar mengajar di tingkatan pendidikan SMA semakin membaik dalam 4 tahun terakhir.

Tabel 3.4 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Sekolah, 2014/2015-2017/2018

Tahun	Rasio Murid-Guru			Rasio Murid-Sekolah		
	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014/2015	16	7	12	138	76	264
2015/2016	13	15	15	123	198	306
2016/2017	14	15	14	119	204	315
2017/2018	15	14	13	118	168	236

Catatan : * SM meliputi SMA, SMK, dan MA

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan

4. KETENAGAKERJAAN



4

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2015 dan 2017 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha serta persentase pekerja menurut status pekerjaan.

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur pencapaian hasil pembangunan. Selain itu TPAK juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas).

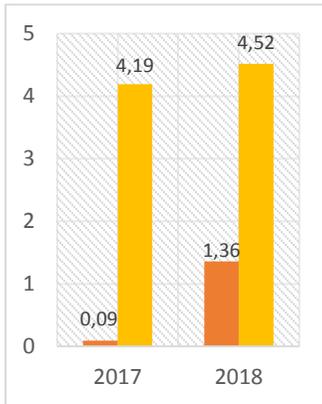
TPAK pada kondisi bulan Agustus 2018 untuk penduduk laki-laki mengalami peningkatan sebesar 3,54 poin jika dibandingkan dengan kondisi yang sama pada tahun sebelumnya yaitu bulan Agustus 2017, sedangkan penduduk perempuan juga meningkat sebesar 7,19 poin. TPAK secara umum mengalami peningkatan sebesar 5,37 poin, yaitu dari 69,16 persen pada Agustus 2017 menjadi 74,53 persen pada Agustus 2018. Peningkatan TPAK ini merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2017 dan 2018

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	84,18	87,72	0,09	1,36
Perempuan	53,56	60,75	4,19	4,52
Laki-Laki + Perempuan	69,16	74,53	1,65	2,62

Gambar 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Konawe Selatan, 2016-2018



Sumber Hasil Sakernas, 2018

Secara umum, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2018 menunjukkan peningkatan dibanding Agustus 2017. TPT Agustus 2017 tercatat sebesar 1,65 persen, meningkat menjadi 2,62 persen pada Agustus 2018. Peningkatan TPT ini mengindikasikan menurunnya penyerapan tenaga kerja bila dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini perlu segera diatasi pemerintah mengingat tingkat partisipasi angkatan kerja Konawe Selatan semakin meningkat.

Peningkatan TPT ini terjadi baik pada angkatan kerja laki-laki maupun perempuan. Khusus pada angkatan kerja laki-laki, peningkatan angka TPT di Konawe Selatan meningkat cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, TPT laki-laki di Konawe Selatan tercatat sebesar 0,09 persen. Namun pada tahun 2018, angka TPT laki-laki di Konawe Selatan meningkat menjadi 1,36 persen. Tentu saja hal ini terkait dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas dan adanya kecenderungan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus.

4.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Harapan setiap individu adalah mudah mendapatkan pekerjaan layak, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada makin tinggi harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Tidak sedikit juga dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi pengangguran.

Secara umum, angka TPT untuk penduduk dengan tingkat pendidikan SMA ke atas tercatat sebesar 5,39 persen pada

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Agustus 2018. Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, terlihat bahwa TPT tertinggi tercatat pada jenjang pendidikan Diploma/Akademi (20,11 persen), kemudian diikuti oleh jenjang Universitas (10,48 persen), dan jenjang SMA (3,50 persen). Sedangkan TPT terendah ditunjukkan pada jenjang pendidikan SMK. Tingginya TPT penduduk dengan jenjang pendidikan SMA keatas tersebut mengindikasikan bahwa lapangan kerja yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan masih harus ditingkatkan, terutama untuk menyerap penduduk yang dengan tingkat pendidikan SMA keatas. Selain itu, pemerintah masih harus mendorong menciptakan lapangan pekerjaan baru karena masih banyak setengah pengangguran yang masih bekerja paruh waktu. Kondisi mereka ini rentan jika terjadi guncangan ekonomi, bisa terdorong ke kategori pengangguran terbuka.

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2017-2018

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus 2018]

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Tingkat Pengangguran Terbuka	
	2017	2018
(1)		
SD	3,45	0,83
SMP	4,20	1,74
SMA	8,71	3,50
SMK	18,77	0,00
Diploma I/II/III dan Akademi	8,40	20,11
Universitas	10,75	10,48
Total	1,65	2,62

4.3. Lapangan Usaha

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran maupun penduduk yang bekerja, sangat erat

kaitannya dengan kinerja sektor-sektor perekonomian atau lapangan usaha di suatu wilayah. Jumlah penduduk yang bekerja menunjukkan kemampuan lapangan usaha ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, tingginya angka pengangguran menunjukkan ketidakmampuan sektor-sektor ekonomi menyerap tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut.

Secara umum penduduk Kabupaten Konawe Selatan pada Agustus 2018 lebih banyak bekerja pada lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan. Lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 75.595 orang atau sekitar 50,03 persen dari seluruh penduduk 15 tahun keatas yang bekerja. Walaupun secara jumlah, angka tersebut meningkat dari tahun 2017 yang tercatat sebanyak 73.772 orang bekerja di lapangan tersebut, namun secara persentase angka tersebut justru menurun karena pada tahun sebelumnya sektor ini mampu menyerap 53,07 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja. Lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar kedua adalah Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi yakni sebanyak 25.020 orang atau sekitar 16,56 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding Agustus 2017 yang tercatat sebesar 16,02 persen.

Berdasarkan jenis kelamin penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, penduduk laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Konawe Selatan lebih banyak bekerja pada lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan, yakni sebanyak 60,66 persen dari penduduk laki-laki dan sebanyak 50.917 orang atau sekitar 41,80 persen dari penduduk perempuan yang bekerja. Hal yang sama juga terjadi pada periode Agustus 2017. Pada Tahun 2018, lapangan usaha yang penyerapan tenaga kerjanya paling sedikit terserap pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama, 2017 dan 2018

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]

Lapangan Usaha	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	49.375	50.917	24.397	24.678	73.772	75.595
Pertambangan dan Penggalian	1.881	5.605	-	-	1.881	5.605
Industri	8.568	8.786	5.902	6.819	14.470	15.605
Konstruksi	5.753	7.998	155	-	5.908	7.998
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	7.582	6.331	14.683	18.689	22.265	25.020
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	9.797	8.200	5.783	8.012	15.580	16.212
Lainnya	4.596	4.218	533	843	5.129	5.061

Catatan : Kelompok Lainnya mencakup Listrik, Gas, dan Air; Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan/Tanah, dan Jasa Perusahaan

4.4. Status Pekerjaan

Status pekerjaan didefinisikan sebagai jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan juga dapat berkaitan dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh pekerja.

Secara umum, penduduk Kabupaten Konawe Selatan usia 15 tahun ke atas bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai. Tahun 2018 tercatat sebanyak 25,70 persen penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Angka tersebut lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2017 yang hanya mencapai 21,57 persen. Sementara itu, penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga tercatat sebanyak 24,21 persen tahun 2017. Angka tersebut sedikit menurun dibanding tahun 2017 yang mencapai 25,91 persen.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2017-2018

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]

Status Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	25,67	18,23	26,21	16,74	25,87	17,65
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga	28,69	25,89	21,18	21,59	25,91	24,21
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3,29	6,42	0,83	2,26	2,38	4,80
Buruh/karyawan/pegawai	23,10	28,91	18,96	20,71	21,57	25,70
Pekerja bebas di pertanian	5,15	4,21	3,01	1,70	4,36	3,23
Pekerja bebas di nonpertanian	4,06	4,22	0,52	0,99	2,75	2,95
Pekerja keluarga/tidak dibayar	10,03	12,12	29,28	36,01	17,16	21,46

Jika dilihat dari jenis kelamin penduduk, secara umum penduduk laki-laki lebih banyak bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Tahun 2018, penduduk laki-laki tercatat sebanyak 28,91 persen, sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar 23,10 persen. Sebaliknya untuk perempuan justru lebih banyak yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga. Pada tahun 2018, penduduk perempuan yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga ada sebanyak 21,59 persen, meningkat sedikit dari tahun 2017 yang sebanyak 21,18 persen.

5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

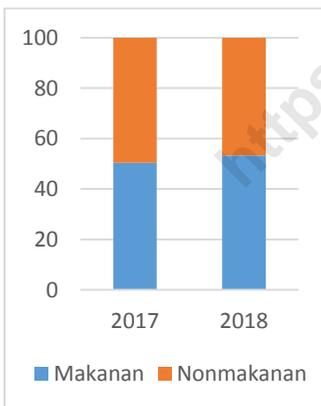


5

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Per Kapita/Bulan, 2016-2018



Sumber Hasil Susenas, 2018

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan, di mana pengeluaran bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama, dan pengeluaran untuk barang-barang lainnya selain dari pengeluaran untuk makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsinya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2017-2018

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase (%)	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	367.594	428.069	50,40	53,26
Bukan Makanan	361.717	375.641	49,60	46,74
Perumahan	186.882	208.918	25,62	25,99
Barang dan Jasa	58.102	77.488	7,97	9,64
Pakaian	20.272	23.060	2,78	2,87
Barang Tahan Lama	74.091	28.328	10,16	3,53
Lainnya	22.369	37.847	3,07	4,71
Jumlah	729.311	803.710	100,00	100,00

Selama periode 2017-2018 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp729.311,- menjadi Rp803.710,-. Bila dilihat proporsi pengeluaran penduduk, persentase pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan dari 50,40 persen pada tahun 2017 menjadi 53,26 persen pada tahun 2018. Sebaliknya, proporsi pengeluaran bukan makanan menurun dari 49,60 persen menjadi 46,74 persen. Jika dilihat pada kategori penyusunnya, penurunan proporsi pengeluaran pada kategori bukan makanan terjadi hanya pada kelompok barang tahan lama saja yang turun drastis dari 10,16 persen menjadi 3,53 persen, sementara kategori lainnya justru mengalami peningkatan.

Secara umum, rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 16,45 persen dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp.367.594,- menjadi Rp.428.069,- perkapita sebulan. Sementara pada pengeluaran bukan makanan, terjadi peningkatan sebesar 3,85 persen dari

Rp.361.717,- pada tahun 2017 menjadi Rp.375.641,- perkapita sebulan pada tahun 2018.

Pada pengelompokan distribusi pengeluaran, rumah tangga dibagi menjadi tiga kelompok yang tidak sama besar. Hal ini bertujuan untuk melihat kemampuan masyarakat dalam pola pengeluaran sehari-hari. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pengeluaran makanan masyarakat dengan pengeluaran 40 persen bawah adalah sebesar 220.917,- dan nonmakanan sebesar Rp155.371,-. Nilai tersebut akan terlihat jauh berbeda jika kita membandingkan dengan pengeluaran kelompok masyarakat yang berada pada kelompok 20% atas.

Selain itu, kita juga dapat melihat pola pengeluaran yang berbeda antara kelompok masyarakat 40% bawah dengan kelompok masyarakat 20% atas. Pada kelompok masyarakat 40% bawah cenderung memiliki pengeluaran makanan yang lebih besar dibandingkan dengan nonmakanannya, begitupun pada kelompok masyarakat 40% tengah. Namun pada kelompok masyarakat 20% atas justru pengeluaran nonmakanan memiliki porsi lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran makanannya.

Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan menurut Kuintil Pengeluaran, 2018 (Rupiah)

[Diolah dari Hasil Susenas]

Distribusi Pengeluaran	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
40% Bawah	220.917	155.371	376.288
40% Tengah	455.899	344.179	800.078
20% Atas	787.337	879.555	1.666.893

5.2. Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2015 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2014), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Rata-rata konsumsi kalori penduduk pada tahun 2018 sebanyak 1.764,54 kkal/hari untuk kelompok masyarakat 40% bawah, 2.127,64 kkal/hari untuk kelompok masyarakat 40% tengah, dan 2.471,88 kkal/hari untuk 20% atas. Hal ini berarti konsumsi kalori per hari penduduk tahun 2018 sebagian besar belum memenuhi syarat kecukupan gizi berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi untuk kategori kecukupan energi. Hanya kelompok masyarakat 20% atas saja yang telah mampu memenuhi kebutuhan kalori perkapita per hari. Dalam hal konsumsi protein, rata-rata masyarakat Konawe Selatan mengonsumsi 57,12 gram per kapita per hari. Dengan demikian, jumlah protein yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Konawe Selatan secara umum telah mampu memenuhi ketentuan atau batas kecukupan gizi yang direkomendasikan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi.

Tabel 5.3 Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari menurut Kuintil Pengeluaran, 2018

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kuintil Pengeluaran	Kalori (kkal/kapita/hari)	Protein (gram/kapita/hari)
(1)	(2)	(3)
40% Bawah	1.764,64	46,48
40% Tengah	2.127,63	59,20
20% Atas	2.471,88	74,25
Rata-rata	2.051,09	57.12

6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN



6

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

UU No. 1 Tahun 2013 menyebutkan salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas, sumber air minum, sumber air utama untuk keperluan sehari-hari, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Sumber Air Pada Rumah Tangga

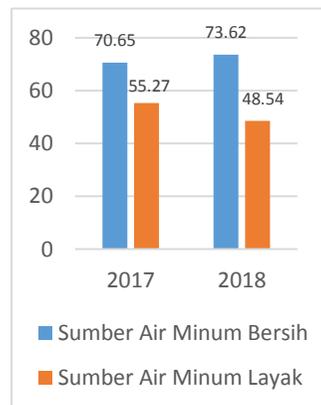
Pada tahun 2018, rumah tangga di Kabupaten Konawe Selatan yang telah mengakses air bersih, yaitu air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) ≥ 10 m, mencapai 73,62 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan tahun 2017, di mana hanya terdapat 70,65 persen rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit

Pada tahun 2018, sebanyak 48,54 persen rumah tangga di Konawe Selatan telah memiliki sumber air minum dengan kategori yang layak. Namun sayangnya, angka tersebut justru menurun dari tahun 2017. Pada tahun 2017, justru sebanyak 56,27 persen rumah tangga di Konawe Selatan mampu memiliki sumber air minum yang layak.

Indikator lainnya yang dapat dilihat untuk mengukur kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat adalah sumber air utama yang digunakan untuk mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Pada tahun 2017-2018, hampir tidak ada penduduk di Konawe Selatan yang memanfaatkan baik itu air kemasa, air isi ulang, ataupun air ledeng untuk keperluan mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Adapun mayoritas masyarakat Konawe Selatan memanfaatkan sumur atau mata air terlindung untuk

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Mata Air, 2016-2018



Sumber Hasil Susenas, 2018

keperluan sehari-hari. Pada tahun 2017, sebanyak 60,96 rumah tangga di Konawe Selatan memanfaatkan sumur/mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari. Angka tersebut kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi sebanyak 58,88 persen saja yang tercatat menggunakan sumur/mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Mata Air Untuk Keperluan Sehari-hari, 2017-2018

[Diolah dari Hasil Susenas]

Indikator Kualitas Perumahan	Tahun	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Sumber air minum bersih	70,65	73,62
Sumber air minum layak	55,27	48,54
Sumber air utama untuk mandi, memasak, cuci, dll		
Air kemasan/isi ulang	0,00	0,00
Ledeng	0,00	0,00
Sumur bor/pompa	17,50	18,44
Sumur/mata air terlindung	60,96	58,88
Sumur/mata air tak terlindung	18,51	21,02

Catatan : ¹⁾ Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) \geq 10 m

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dalam menunjang kebersihan dan sanitasi yang baik dalam suatu rumah tinggal. Sanitasi yang baik merupakan faktor utama yang mendukung bagi kesehatan masyarakat yang tinggal dalam suatu lingkungan. Kelayakan sanitasi tersebut dapat dilihat dari jenis kloset yang digunakan, penggunaan jamban milik sendiri, hingga ketersediaan tangki septik sebagai tempat penampungan akhir kotoran.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri maupun jamban yang sudah memiliki tangki septik. Pada tahun 2018, rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri sebanyak 73,90 persen, mengalami penurunan dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 77,80 persen.

Sistem pembuangan dengan jenis leher angsa bertujuan agar kotoran tidak langsung jatuh ke lubang penampungan kotoran. Hal ini secara tak langsung menghalangi mikroba dan bakteri yang keluar dari kotoran. Selain itu, penggunaan kloset leher angsa juga agar bakteri yang ada pada septic tank tidak keluar dan mencemari toilet. Pada tahun 2018, rumah tangga di Kabupaten Konawe Selatan yang telah memiliki kloset dengan jenis leher angsa mencapai 81,34 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan tahun 2017, di mana hanya terdapat 71,43 persen rumah tangga yang telah memiliki kloset dengan leher angsa di rumahnya.

Sementara itu, kondisi berbeda justru terjadi pada persentase rumah tangga yang menguasai kepemilikan jamban dengan tangki septik, SPAL. Pada tahun 2018, sebanyak 78,04% rumah tangga di Konawe Selatan telah memiliki jamban dengan tangki septik, SPAL di rumahnya. Angka tersebut meningkat cukup tinggi dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2017 hanya terdapat 69,94% rumah tangga yang memiliki jamban dengan tangki septik, SPAL di rumahnya. Peningkatan kepemilikan jamban dengan adanya tangki septik ini mengindikasikan bahwa masyarakat Konawe Selatan semakin peduli mengenai sanitasi dan kesehatan lingkungannya. Kondisi tersebut tentu sejalan dengan peningkatan persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum bersih di Konawe

Selatan pada tahun 2018 yang juga meningkat.

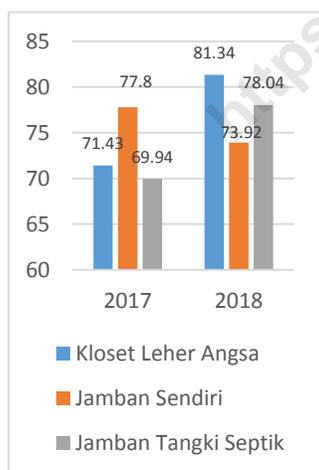
Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2017-2018

[Diolah dari Hasil Susenas]

Fasilitas Perumahan	Tahun	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Kloset dengan leher angsa	71,43	81,34
Jamban sendiri	77,80	73,92
Jamban dengan tangki septik, IPAL	69,94	78,04

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas, 2016-2018



Sumber Hasil Susenas, 2018

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas 2018, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 94,382 persen. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 5,62 persen baik itu kontrak/sewa, bebas sewa/rumah dinas/lainnya. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri tahun 2018 tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana pada tahun 2017 hanya terdapat 94,02 persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2017-2018

[Diolah dari Hasil Susenas]

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	Tahun	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	94,02	94,38
Bukan Milik Sendiri	5,98	5,62

<https://konselkab.bps.go.id>

7. KEMISKINAN



7

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk Sulawesi Tenggara. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomiyang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

7.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2013-2018. Tahun 2013, jumlah penduduk miskin sebesar 35,17 ribu jiwa atau 12,45 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Konawe Selatan. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan hingga pada tahun berikutnya angka kemiskinan berhasil turun menjadi 33,77 ribu jiwa atau sebesar 11,60 persen. Pada tahun berikutnya sempat terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Konawe Selatan menjadi sebanyak 34,05 ribu jiwa. Namun demikian, secara persentase, pada tahun 2014 yang tercatat sebesar 11,60 persen masih lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 12,45 persen.

Kebijakan pengentasan kemiskinan di Konawe Selatan terbukti efektif, hal ini terlihat dari semakin turunnya angka kemiskinan di Konawe Selatan baik dari sisi jumlah penduduk miskin maupun dari sisi persentase penduduk miskin. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Konawe Selatan tercatat hanya tersisa sebanyak 33,73 ribu jiwa penduduk atau sebesar 10,95 persen dari seluruh penduduk Konawe Selatan. Konawe Selatan bahkan menjadi kabupaten/kota dengan angka persentase penduduk miskin terendah ketiga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Konawe Selatan, 2013-2018

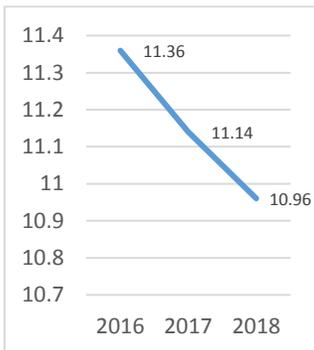
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2013	35,17	12,45
2014	33,77	11,60
2015	34,05	11,58
2016	33,94	11,36
2017	33,73	11,14
2018	33,73	10,95

Catatan :Data kemiskinan merupakan kondisi bulan Maret

7.2. Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk

Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin, 2016-2018



Sumber Hasil Susenas, 2018

mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Konawe Selatan mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2016-2018. Garis kemiskinan Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 195.175,- per kapita per bulan. Pada tahun 2017 garis kemiskinan meningkat menjadi sebesar Rp. 200.663,- per kapita per bulan, kemudian tahun 2018 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 219.970,- per kapita per bulan.

Dengan demikian, selama tahun 2016-2018, garis kemiskinan di Konawe Selatan telah meningkat sebesar 12,70 persen. Catatan kondisi rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang cenderung makin menjauhi garis kemiskinan, disertai ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang juga semakin melebar, hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan ketimpangan pendapatan lebih kepada kelompok penduduk tidak miskin. Sementara, kelompok penduduk miskin masih menerima pendapatan yang cukup rendah sehingga tidak mampu mengangkat taraf ekonominya. Di saat yang sama, besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan juga mengalami peningkatan.

Tabel 7.2 Garis Kemiskinan(Rp/Kapita/Bulan), 2016-2018

Indikator	Tahun		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Garis Kemiskinan	195.175	200.663	219.970

Sumber : BPS

<https://konselkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

I**(1) Indikator Kependudukan**

[Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035]

Kecamatan	Penduduk (jiwa)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		
	2015	2016	2017	2018	2015-2016	2016-2017	2017-2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tinanngea	23 797	24 168	24 514	24 923	1,56	1,43	1,67
Lalembuu	17 416	17 687	17 939	18 240	1,56	1,42	1,68
Andoolo	9 914	10 068	10 214	10 383	1,55	1,45	1,65
Buke	14 772	15 002	15 216	15 471	1,56	1,43	1,68
Andoolo Barat	8 297	8 426	8 545	8 690	1,55	1,41	1,70
Palangga	13 715	13 929	14 128	14 364	1,56	1,43	1,67
Palangga Selatan	6 852	6 959	7 058	7 176	1,56	1,42	1,67
Baito	8 440	8 571	8 694	8 840	1,55	1,44	1,68
Lainea	9 902	10 056	10 200	10 370	1,56	1,43	1,67
Laeya	21 216	21 547	21 854	22 220	1,56	1,42	1,67
Kolono	10 360	10 056	10 673	10 850	1,56	1,44	1,66
Kolono Timur	4 823	4 897	4 967	5 051	1,53	1,43	1,69
Laonti	10 542	10 706	10 859	11 040	1,56	1,43	1,67
Moramo	14 483	14 709	14 919	15 168	1,56	1,43	1,67
Moramo Utara	8 008	8 133	4 083	8 387	1,56	1,44	1,66
Konda	20 239	20 556	20 848	21 196	1,57	1,42	1,67
Wolasi	5 280	5 362	5 438	5 530	1,55	1,42	1,69
Ranomeeto	18 108	18 390	18 653	18 965	1,56	1,43	1,67
Ranomeeto Barat	7 275	7 388	7 494	7 620	1,55	1,43	1,68
Landono	7 547	7 664	7 774	7 903	1,55	1,44	1,66
Mowila	12 483	12 677	12 859	13 074	1,55	1,44	1,67

Kecamatan	Penduduk (jiwa)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		
	2015	2016	2017	2018	2015-2016	2016-2017	2017-2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sabulakoa	5 255	5 338	5 414	5 505	1,58	1,42	1,68
Angata	16 637	16 897	17 138	17 424	1,56	1,42	1,67
Benua	10 863	11 033	11 190	11 376	1,56	1,42	1,66
Basala	9 102	9 244	9 376	9 532	1,56	1,43	1,66
Kabupaten Konawe Selatan	295 326	299 928	304 214	309 298	1,56	1,43	1,67

<https://konselkab.bps.go.id>

II

(2) Indikator Kependudukan

[Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035]

Kecamatan	Penduduk Menurut Jenis Kelamin (jiwa), 2018			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tinannggea	12 672	12 251	24 923	103
Lalembuu	9 286	8 954	18 240	104
Andoolo	5 276	5 107	10 383	103
Buke	7 968	7 503	15 471	106
Andoolo Barat	4 467	4 223	8 690	106
Palangga	7 268	7 096	14 364	102
Palangga Selatan	3 636	3 540	7 176	103
Baito	4 533	4 307	8 840	105
Lainea	5 217	5 153	10 370	101
Laeya	11 179	11 041	22 220	101
Kolono	5 537	5 313	10 850	104
Kolono Timur	2 536	2 515	5 051	101
Laonti	5 588	5 452	11 040	102
Moramo	7 741	7 427	15 168	104
Moramo Utara	4 237	4 150	8 387	102
Konda	10 709	10 487	21 196	102
Wolasi	2 795	2 735	5 530	102
Ranomeeto	9 647	9 318	18 965	104
Ranomeeto Barat	3 837	3 783	7 620	101
Landonon	4 020	3 883	7 903	104
Mowila	6 881	6 193	13 074	111

Kecamatan	Penduduk Menurut Jenis Kelamin (jiwa), 2017			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sabulakoa	2 817	2 688	5 505	105
Angata	8 851	8 573	17 424	103
Benua	5 891	5 485	11 376	107
Basala	4 897	4 635	9 532	106
Kabupaten Konawe Selatan	157 486	151 812	309 298	104

<https://konselkab.bps.go.id>

[Proyeksi Penduduk Indonesia 2012 - 2035]

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk per Km ²			Persentase Penduduk		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tinannggea	354,74	67	68	70	8,06	8,06	8,06
Lalembuu	204,80	85	86	89	5,90	5,90	5,90
Andoolo	103,61	95	97	100	3,36	3,36	3,36
Buke	185,61	44	89	83	5,00	5,00	5,00
Andoolo Barat	75,46	195	111	115	2,81	2,81	2,81
Palangga	177,83	77	78	81	4,64	4,64	4,64
Palangga Selatan	110,21	62	63	65	2,32	2,32	2,32
Baito	152,71	55	56	58	2,86	2,86	2,86
Lainea	210,11	47	47	49	3,35	3,35	3,35
Laeya	277,96	76	77	80	7,18	7,18	7,18
Kolono	344,59	30	30	31	3,51	3,51	3,51
Kolono Timur	122,80	39	39	41	1,63	1,63	1,63
Laonti	406,63	25	26	27	3,57	3,57	3,57
Moramo	237,89	60	61	64	4,90	4,90	4,90
Moramo Utara	189,05	42	43	44	2,71	2,71	2,71
Konda	132,84	152	154	160	6,85	6,85	6,85
Wolasi	160,28	32	33	35	1,79	1,79	1,79
Ranomeeto	96,57	187	190	196	6,13	6,13	6,13
Ranomeeto Barat	76,07	95	97	100	2,46	2,46	2,46
Landono	125,00	60	61	63	2,56	2,56	2,56
Mowila	127,41	97	99	103	4,23	4,23	4,23

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk per Km ²			Persentase Penduduk		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sabulakoa	68,50	76	77	80	1,78	1,78	1,78
Angata	329,54	50	51	53	5,63	5,63	5,63
Benua	138,31	78	79	82	3,68	3,68	3,68
Basala	105,68	86	87	90	3,08	3,08	3,08
Kabupaten Konawe Selatan	4 514,20	65	66	69	100,00	100,00	100,00

<https://konselkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Jl Poros 60, Andoolo, Komplek Perkantoran Pemda
Email: bps7405@bps.go.id | Telp: (0401) 3088520